

PENGEMBANGAN INOVASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA MODEL E-GOVERNMENT BERBASIS INFORMATION TECHNOLOGY

Oleh :

Daryono ¹⁾, Jaryono ¹⁾

E-mail : daryono_jvc@yahoo.co.id

1) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

The growing body of literature associated with information and communication technology within the rural community had examined numerous factors and interrelationships in order to gain a better understanding on the usage of computers among rural people. Rural administrators play a vital role to ensure information and communication technology is utilized regularly by the rural society. Thus, it is significant to draw to attention to the factors affecting rural administrators' information and communication technology usage and its implications to rural administrators profesional development strategies.

Keywords: *Development Rural Administration, E-Government, ICT*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketersediaan data profil desa/kelurahan sangat penting karena sesuai dengan Permendagri No 12 Tahun 2007 data profil desa adalah dasar perencanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Data desa juga sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi pembangunan. Tersedianya data profil desa juga merupakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan data Kantor Pemberdayaan Masyarakat, dapat diketahui bahwa sampai dengan akhir 2013 masih banyak desa yang belum mempunyai database yang baik yang merupakan komponen utama dalam penyusunan profil suatu desa. Kendala yang dihadapi desa dalam penyusunan profil umumnya adalah kurangnya dana, kurangnya sumberdaya manusia yang berkeahlian, dan terbatasnya investasi dibidang teknologi serta terbatasnya peralatan pendukung. Salah satu potensi yang dipandang sangat mendukung adalah adanya organisasi pemuda di desa serta kader posyandu dan organisasi masyarakat lainnya yang dapat digerakkan dalam rangka mensukseskan pendataan.

Instansi Pemerintah pada Kantor Kepala Desa merupakan suatu instansi melakukan pendataan penduduk terutama dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran, Surat ematian, dan Surat Keterangan Pindah. Untuk dapat

meningkatkan pendataan penduduk beserta laporannya kepada instansi yang lebih tinggi yaitu kecamatan, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan sistem pendataan yang sudah berjalan dengan sistem baru dimana komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pendataan penduduk sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji

Pada dasarnya, e-Gov adalah penggunaan teknologi informasi (IT) yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis, didalamnya melibatkan otomatisasi dan komputerisasi pada prosedur paper-based yang mendorong cara-cara baru dalam kepemimpinan, mendsikusikan dan menetapkan strategi, transaksi bisnis, mendengarkan warga dan komunitas, serta mengorganisasi dan menyampaikan informasi [Pascual, 2003]. Semakin besarnya peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berlomba mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi. Salah satunya adalah melalui implementasi e-Gov, di mana idealnya e-Gov diharapkan dapat membantu meningkatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis sehingga mampu mendorong perkembangan politik dan ekonomi.

Inisiatif e-Gov di Indonesia telah diperkenalkan melalui Inpres No. 6/2001 yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. e-Gov wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area di mana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan menyederhanakan hubungan antar masyarakat dan pemerintah. Pelayanan e-Gov melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Contoh interaksi satu arah adalah fasilitas download formulir, contoh interaksi dua arah adalah pengumpulan formulir secara online, sedangkan pelayanan elektronik penuh dapat berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran). Berdasarkan fakta yang ada, pelaksanaan e-Gov di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs atau pemberian informasi. Data bulan Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs web, akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal mempertahankan kelangsungan operasi karena alasan anggaran, dan pada awal tahun 2003 hanya ada 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap (Jakarta Post, 15/01/2003). Perlu digarisbawahi bahwa e-Gov bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah namun perlu diupayakan hingga pada layanan full-electronic delivery service [www.indonesia.go.id/, 20/12/2011].

B. Uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Hasil evaluasi atas praktek pengembangan e-Gov menunjukkan bahwa implementasi e-Gov khususnya di Indonesia banyak yang mengalami kegagalan, karena adanya kesalahan paradigma tentang e-Gov yang tidak sesuai dengan konsep yang benar [Supangkat, 2006]. Beberapa faktor penghambat dalam e-Gov, antara lain: 1) komitmen pemerintah dalam

integrasi dan transparansi publik, 2) belum adanya budaya berbagi informasi, 3) belum adanya budaya dokumentasi yang tertib, 4) resistensi terhadap perubahan, 5) kelangkaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, 6) infrastruktur yang belum memadai dan mahal, serta 7) tempat akses yang terbatas [Raharjo, 2001].

Resistensi terhadap perubahan sebagai penyebab faktor penghambat dalam e- Gov bisa terjadi sebagai akibat dari adanya: 1) ego sektoral organisasi sehingga menutup kemungkinan untuk mau diatur atau bekerjasama dengan organisasi lain; 2) anggapan bahwa sistem informasi merekalah yang terbaik dibanding lainnya; 3) konteks kepentingan yang berbeda pada setiap organisasi sehingga sulit dicari titik temu untuk melakukan integrasi secara cepat; 4) keinginan untuk menjadi pimpinan tim integrasi dalam konsorsium kerja sama; 5) ketidakinginan untuk saling membagi data/informasi/pengetahuan karena dianggap mengurangi keunggulan kompetitif individu/organisasi; 6) ketidaktahuan memulai integrasi dari mana sehingga kondusif untuk dilakukan sejumlah pihak terkait; dan lainnya [Indrajit, 2006].

Program e-KTP diterbitkan mengacu pada UU no. 23 tahun 2006, Perpres no. 26 tahun 2009, dan Perpres no. 35 tahun 2010, sehingga berlaku secara nasional dan diharapkan mempermudah penduduk dalam mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Terkait dengan program tersebut, saat ini Pemerintah sedang berada dalam tahapan perekaman sidik jari, foto, dan tanda tangan, serta masih ada 3 tahap yang harus dilaksanakan, yakni personalisas e-KTP, penerbitan e-KTP, dan penyerahan e-KTP. Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi penerbitan NIK dan penerapan e-KTP, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT mendampingi Depdagri secara teknis dalam pengembangan software SIAK online yang mencakup perancangan infrastruktur jaringan antar kabupaten, data center pada Dirjen Administrasi Kependudukan, perancangan disaster recovery center (DRC), dan konsolidasi data dalam sistem, serta melakukan pendampingan teknis dalam pembuatan e-KTP.

METODOLOGI PENULISAN

a. Metode Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari referensi berupa dokumen/berkas dan mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian dsb. Melalui studi pustaka dilakukan kajian terhadap peraturan-peraturan perundangan yang terkait pengelolaan potensi daerah. Kebutuhan data-data yang mengungkapkan tentang indikator-indikator yang digunakan oleh calon investor untuk pengambilan keputusan investasi diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku dan jurnal penelitian. Studi pustaka juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan teknologi informasi yang akan diterapkan dalam sistem

b. Metode *Observasi*

Metode observasi merupakan metode penelitian dimana, peneliti melakukan pengamatan/melihat dan meneliti langsung ke obyek penelitian tentang seluruh aktifitas yang berhubungan dengan maksud penelitian, Dengan menganalisa mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dan memberikan solusi melalui sistem informasi yang akan

dibangun sehingga dapat lebih bermanfaat.

c. Metode Wawancara

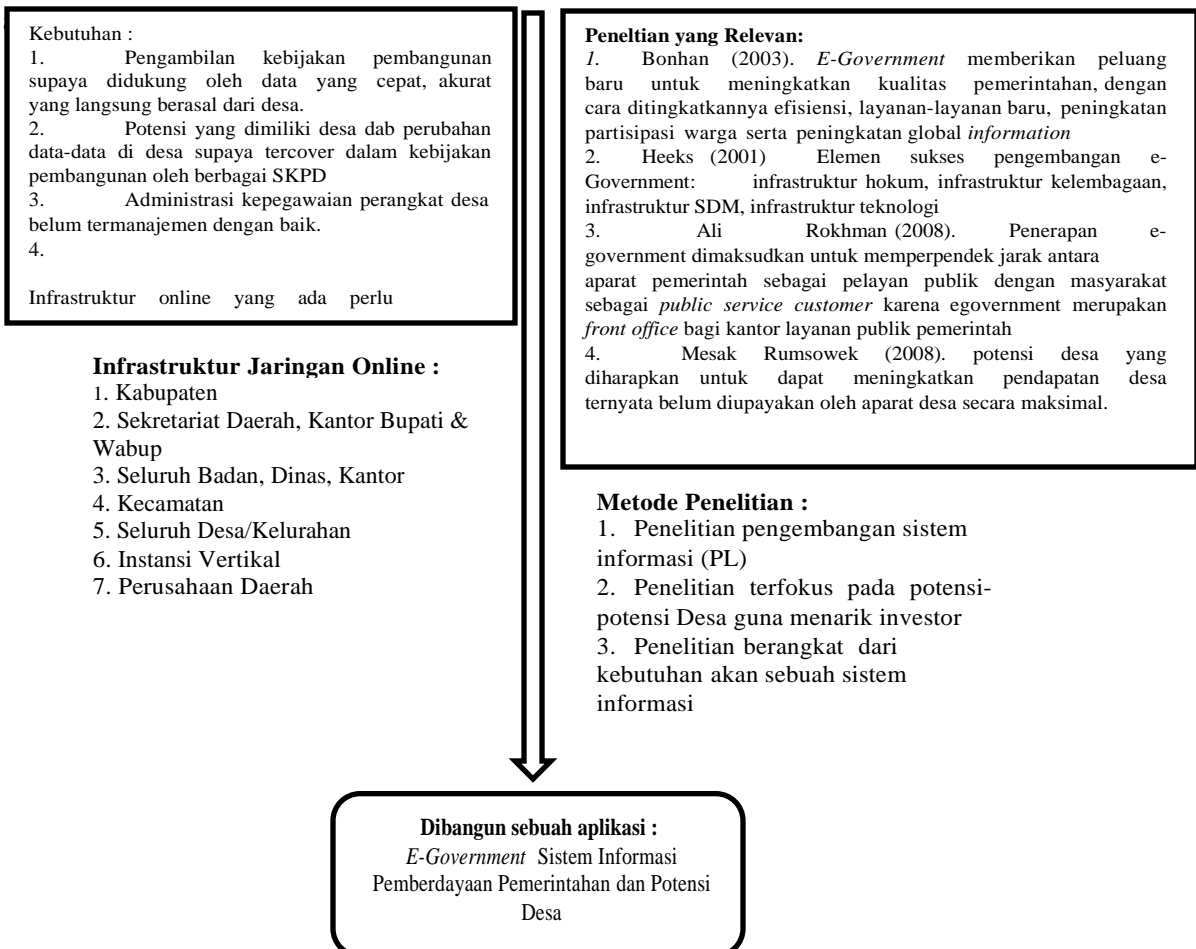
Wawancara merupakan percakapan antara peneliti dengan informan. Peneliti disini yang berharap mendapatkan informasi, sedangkan informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu obyek, Wawancara dilakukan langsung kepada para pegawai perangkat desa, masyarakat, serta instansi terkait terhadap sistem pemerintahan desa maupun potensi-potensi yang ada di desa.

1. Analisis dan Sintesis

Analisis dan Sintesis untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif, dalam perencanaan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

A. Kerangka pemikiran inovasi administrasi data pemerintah desa dengan aplikasi e-gov berbasis informasi system.

Dengan melihat kondisi tersebut maka perlu dibangun aplikasi *electronic government* untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas sehingga dapat digunakan untuk memberikan informasi potensi desa yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan maupun keputusan investasi oleh calon investor, seperti yang penulis gambarkan sebagai berikut :



B. Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sedangkan tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari : metode pengembangan terstruktur dengan pendekatan siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle/SDLC). Terdiri dari beberapa fase antara lain sebagai berikut :

a. Perencanaan (Planning)

Pada tahap ini lebih fokus pada penafsiran kebutuhan dan diagnosa masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dari sistem yang akan dibangun.

b. Analisa Sistem (System Analysis)

Pada fase ini dilakukan analisa terhadap sistem yang ada dengan metode yang digunakan yaitu metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan pengamatan terhadap kondisi desa yang menjadi ruang lingkup penelitian. Pada fase ini meliputi: menentukan obyek, mempelajari organisasi, menganalisis kebutuhan output, menganalisis kebutuhan input, evaluasi efektifitas sistem.

c. Perancangan Sistem (System design)

Dalam merancang sistem ini berdasar pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi pada obyek penelitian. Pada fase ini meliputi perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, kebutuhan perangkat keras, perancangan jaringan, kebutuhan perangkat lunak.

d. Implementasi Sistem (System Implementation)

Setelah melalui tahapan requirement, analysis dan design, maka seluruh sistem siap untuk diimplementasikan. Dalam tahapan implementasi ada beberapa tugas yang dijalankan diantaranya mengimplementasikan design dalam komponen-komponen, source code, script, executable dan sebagainya. Kemudian menyempurnakan arsitektur dan mengintegrasikan komponen-komponen (mengcompile dan link ke dalam satu atau lebih executable) untuk integrasi dan testing system. Setelah rancangan sistem dibuat, kemudian dilakukan implementasi dengan membuat program dan pengujian program.

e. Operasi dan pemeliharaan sistem (System operation and maintenance)

Pada tahap ini dilakukan pelatihan terhadap pengguna dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan, apabila ada kekurangan maupun kesalahan diadakan perbaikan dan perawatan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian rekayasa pembangunan aplikasi *Electronic Government* untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis IT, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan terbangunnya aplikasi *Electronic Government* untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis IT maka terbentuk suatu database pemerintahan, potensi desa dan data pendukung peluang investasi yang datanya bersumber langsung dari beberapa desa/kelurahan. Data-data yang tercakup dalam database merupakan data-data yang dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh berbagai SKPD guna menunjang arah kebijakan pembangunan serta calon investor untuk pertimbangan pengambilan keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, M. Alwi, dkk.1993, *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia vol. 5 dan 6*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali Rokhman, 2008. *Customer Service Pemerintah Melalui E-Government: The 2nd National Conference UKWMS Surabaya*, 6 September 2008
- Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teorenik dan Implementasi Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas*, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta-red.
- Mc. Leod, R.Jr. (1995), *Management Informatika System, 6th Ed.* New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutanta, E. 2004. *Sistem Basis Data*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kuncoro, Mudrajad, DR dan Anggi Rahajeng, *Daya Tarik Investasi dan Pungli DIY*, www. mudrajatkuncoro.com, 18 Desember 2007.
- Eddy Satriya (2006). Pentingnya Revitalisasi e-Government di Indonesia, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, Bandung.
- Slamet, Abdul Razak bin Hamdan, Aziz Deraman (2007). Rekontruksi dan Reformasi Menuju Percepatan Target e-Government di Indonesia, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi*, Bandung.
- Djoko Agung Harijadi (2005). Blueprint Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informasi, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi*, Bandung.
- Kendal, K.E, Kendal, J.E. (2002). *Analisis dan Perancangan Sistem, Edisi kelima jilid 1*. Terjemahan:Thamir A.H. Al-Hamdany (2006), PT Indeks Kelompok